

ABSTRAKSI

Dengan diluncurkannya paket Deregulasi oleh pemerintah, memberikan perubahan yang cukup besar dalam dunia usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan para produsen Indonesia mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendayagunakan sumber daya yang ada di bumi Indonesia dalam operasi usahanya. Pada tahun 1992 - 1995 penjualan di bidang industri perkayuan mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung dengan adanya ijin pengelolaan kawasan industri oleh pihak swasta dari pemerintah, sehingga badan usaha berusaha meningkatkan kinerjanya. Laporan keuangan merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan kinerja yang dicapai oleh badan usaha.

Badan usaha tempat eksposisi dilakukan adalah pada PT "X" yang bertempat kedudukan usaha di Gresik. Badan usaha tersebut bergerak dalam bidang perkayuan, khususnya kayu lantai yang berorientasi ke pasar luar negeri.

PT "X" menerapkan pendelegasian wewenang dalam melaksanakan operasinya. Hal tersebut berlaku juga pada aktivitas penjualan, sehingga ada pihak-pihak yang terkait guna menunjang kelancaran aktivitas tersebut. Pihak-pihak yang terkait tersebut belum menjalankan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh badan usaha dengan baik, sehingga tugas dan tanggung jawab saling tumpang tindih dan terjadi perangkapan tugas. Hal ini juga dikarenakan adanya otorisasi pada aktivitas penjualan sebagian besar dilakukan oleh satu bagian. Keadaan tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan pada penilaian sistem pengendalian internal aktivitas penjualan badan usaha dan laporan keuangan yang disusun.

Aktivitas yang terdapat pada PT "X" berbagai macam, maka pembahasan yang dilakukan dibatasi hanya pada aktivitas penjualan ekspor.

Data dan informasi yang digunakan dikumpulkan dengan menyusun kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan dan melakukan interview melalui wawancara dengan pihak manajemen badan usaha.

Kendala yang dihadapi oleh PT "X" berhubungan dengan struktur organisasi, kegiatan badan usaha, dan prosedur penjualan ekspor badan usaha. Dalam menganalisis dan membahas masalah yang dihadapi dilakukan dengan melalui *Compliance Test* terhadap aktivitas penjualan dan

menggunakan *Attribute Sampling* terhadap aktivitas penjualan. Dari hasil kuesioner yang diajukan menunjukkan bahwa pengendalian internal atas siklus pendapatan yang ada dalam badan usaha cukup memadai. Dan dari audit yang dilakukan dengan menggunakan metode *Stop-or-Go Sampling* menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Badan usaha tidak menggunakan formulir dengan bernomor urut tercetak, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kelalaian pencatatan dan dapat disalahgunakan. Transaksi yang terdapat dalam badan usaha dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir hanya oleh satu bagian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembuatan faktur yang dilakukan oleh bagian ekspor.

Upaya yang dapat dilakukan oleh PT "X" guna menghadapi masalah tersebut adalah membuat formulir secara bernomor urut tercetak. Bagian keuangan sebaiknya yang membuat faktur penjualan. Transaksi tidak hanya dilakukan oleh satu bagian saja, agar saling terjadi pengecekan internal antar bagian yang terlibat.